



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 188.54/Kep.858-Hukham/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 188.54/Kep.911-Hukham/2022 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat untuk tahun 2023, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.911-Hukham/2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.778-Hukham/2023;
- b. bahwa untuk mengakomodasikan kebutuhan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk Peraturan Gubernur Jawa Barat, perlu dilakukan perubahan keempat atas program perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.911-Hukham/2022 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



CB69EA71B3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/CB69EA71B3>

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.911-Hukham/2022 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.778-Hukham/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.911-Hukham/2022 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2023;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.911-Hukham/2022 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.778-Hukham/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.54/Kep.911-Hukham/2022 tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Barat Tahun 2023 diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Desember 2023

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CB69EA71B3

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 188.54/Kep.858-Hukham/2023

TANGGAL : 14 Desember 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR
188.54/Kep.911-Hukham/2022 TENTANG
PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2023.

PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2023

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
1.	Pemberian Izin dan Rekomendasi Pengangkatan Anak	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
2.	Penugasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Cirebon Raya	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
3.	Remunerasi Direksi dan Badan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Jawa Barat	
4.	Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	
5.	Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
6.	Remunerasi pada Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
7.	Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penetapan Persetujuan Capaian Kinerja Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Bidang Layanan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



CB69EA71B3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/CB69EA71B3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
8.	Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
9.	Penugasan BUMD PT Jasa Sarana dalam Pengelolaan Bus Rapid Transit di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung	
10.	Inovasi Daerah	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat
11.	Tata Cara Pengajuan Usulan, Verifikasi, dan Validasi Usulan Bantuan Keuangan, Hibah/Bantuan Sosial, dan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
12.	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)/Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah Provinsi Jawa Barat	
13.	Pengelolaan Barang Persediaan untuk Penanganan Sosial	
14.	Rencana Aksi Daerah untuk Penyandang Disabilitas	
15.	<i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045	
16.	Pengangkatan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
17.	Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah Provinsi Jawa Barat	
18.	Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Korban Perdagangan dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	
19.	Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
20.	Rencana Induk Pembangunan Pergaraman Daerah	
21.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
22.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Jenis Pungutan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
23.	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2023	
24.	Lisensi Arsitek	Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
25.	Penyelenggaraan Penanganan Infrastruktur dan Peningkatan Sosial Ekonomi di Kawasan Permukiman Kumuh	
26.	Pengelolaan Rumah Susun	
27.	Penyelenggaraan <i>Portal Jabarprovgo.id</i> , Situ Web Perangkat Daerah dan <i>J-Site</i> di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
28.	Penyelenggaraan <i>Paltform Super App</i> Sapawarga di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
29.	Penyelenggaraan Platform Ekosistem Data Jawa Barat	
30.	Pengelolaan Sistem Layanan Pengaduan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
31.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
32.	Pengelolaan Pengaduan Berkadar Pengawasan pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
33.	Penyelenggaraan Perizinan Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Barat	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
34.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
35.	Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



CB69EA71B3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/CB69EA71B3>

No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
36.	Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
37.	Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
38.	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
39.	Penggunaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis serta Pemeliharaan Arsip Vital	
40.	Penyusutan Arsip	
41.	Pelaksanaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
42.	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	
43.	Pedoman Penyusunan Jadwal Retensi Arsip	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
44.	Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
45.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
46.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
47.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
48.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
49.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
50.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
51.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
52.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
53.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
54.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
55.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
56.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
57.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
58.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
59.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
60.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
61.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
62.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
63.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
64.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
65.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
66.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
67.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
68.	Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
69.	Pedoman Penyusunan Rencana Pelayanan Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
70.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
71.	Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital Bylaws</i>) dan Peraturan Staf Medis Rumah Sakit (<i>Medical Staff Bylaws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Paru	
72.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat	
73.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat	
74.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Pameungpeuk Garut Provinsi Jawa Barat	



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
75.	Peraturan Internal (<i>Hospital By Laws</i>) pada Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
76.	Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
77.	Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
78.	Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
79.	Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
80.	Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Barat Mengenai Penanggulangan <i>Coronavirus Disease 2019</i> (Covid-19)	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
81.	Penilaian Kepatuhan Hukum dalam Pembiayaan Infrastruktur	
82.	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

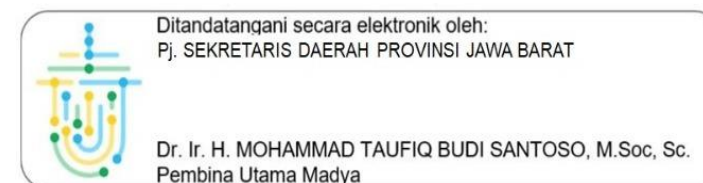


No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
83.	Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
84.	Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 55 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	
85.	Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	
86.	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Jawa Barat	Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
87.	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan di Daerah Provinsi Jawa Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
88.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
89.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	
90.	Penyelenggaraan Kemitraan Kepemudaan	
91.	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Provinsi Jawa Barat	Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
92.	Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
93.	Sistem Pengembangan Kompetensi Terintegrasi pada Jawa Barat <i>Corporate University</i>	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



No.	Judul Rancangan Peraturan Gubernur	Pemrakarsa
94.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Swadaya Perkebunan, Penyuluh Swasta Perkebunan, Fasilitator Daerah Perkebunan, Pelaku Usaha Perkebunan, dan Tenaga Kerja Perkebunan	Dinas Perkebunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
95.	Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat
96.	Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pembangunan Simpang Susun Jalan Tol Cikampek - Palimanan (Cipali) KM 77+800	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

a.n. Pj. GUBERNUR JAWA BARAT
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



CB69EA71B3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/CB69EA71B3>